

Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi Pada Provinsi Banten

¹Inda Meylly Putri, ²Michael Iken Bonar Anju Sibagariang, ³Nabila Arinov Mey, ⁴Pradino Kusumo, ⁵Rince Monica Hutagalung, ⁶Rizky Adi Mahendra, ⁷Wisnu Yuwono

^{1,2,3,4,5,6,7}Manajemen, Bisnis dan Manajemen, Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: ¹2141143.ind@uib.edu, ²2141020.michael@uib.edu, ³2141015.nabila@uib.edu, ⁴2141100.pradino@uib.edu, ⁵2141045.rince@uib.edu, ⁶2141134.rizky@uib.edu, ⁷wisnu@uib.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Inflasi
Pengangguran
Kebijakan Fiskal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait ancaman pengangguran pasca kenaikan inflasi. Melakukan penelitian terkait tingkat pengangguran pada Provinsi Banten. Metode penelitian yang diaplikasikan pada penelitian ini merupakan metode penelitian kuantitatif yaitu data dalam bentuk numerik (angka), metode pengambilan data serta analisis yang dipergunakan yaitu metode Analisis Data Sekunder (ADS). Adapun hasil dari penelitian ini ialah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah serta solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka pengangguran melalui kebijakan fiskal dengan pemanfaatan pajak seperti mengembangkan UMKM dan mengoptimalkan penurunan tarif pajaknya, meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memperluas sektor wisata dan akomodasi hotel, dan mengoptimalkan balai pelatihan kerja.

ABSTRACT

Keywords:

Inflation
Unemployment
Fiscal Policy

This study aims to analyze government policies related to the threat of unemployment after rising inflation. Conducting research related to the unemployment rate in Banten Province. The research method applied in this study is a quantitative research method, namely data in numerical form (numbers), the method of data collection and analysis used is the Secondary Data Analysis (ADS) method. The results of this study are policies that have been implemented by the government as well as solutions that can be carried out by the government in reducing unemployment through fiscal policies by utilizing taxes such as developing MSMEs and optimizing reducing tax rates, increasing the effectiveness of State-Owned Enterprises (BUMN), expanding the sector travel and hotel accommodation, and optimizing job training centers.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Perekonomian global mempengaruhi keadaan ekonomi setiap negara. Indonesia sebagai salah satu negara yang ada juga akan merasakan dampak akibat gejolak perekonomian global. Salah satu permasalahan dalam sistem ekonomi suatu negara yang selalu dihindari ialah inflasi. Inflasi akan menyebabkan kenaikan harga jasa ataupun barang pada pasar secara keseluruhan. Inflasi juga akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dampak yang diberikan dapat bersifat positif maupun negatif. Setiap negara mengusahakan kecepatan pertumbuhan perekonomian dapat berjalan stabil agar dapat menghindari terjadinya inflasi. Apabila terjadi inflasi maka suatu negara akan mengalami berbagai fenomena seperti penurunan pendapatan nasional, menurunnya minat masyarakat untuk menabung, daya masyarakat menurun, peningkatan biaya produksi, serta meningkatnya angka pengangguran (Hartati, 2020).

Dampak positif inflasi dapat dirasakan oleh beberapa kelompok akibat adanya inflasi karena dengan penurunan nilai mata uang beberapa kelompok ini akan mengalami peningkatan dalam minat menabung ataupun berinvestasi. Kelompok ini dapat memanfaatkan momentum saat nilai mata uang dalam keadaan lemah. Namun, secara keseluruhan dampak inflasi akan memberikan ancaman serta menjadi bayangan gelap bagi keseluruhan masyarakat di suatu negara (Ningsih & Andiny, 2018).

Salah satu dampak inflasi yang akan muncul ialah meningkatnya jumlah pengangguran. Persentase inflasi akan menentukan persentase pengangguran dikarenakan apabila terjadi inflasi, maka pasokan bahan baku serta biaya produksi suatu perusahaan akan meningkat, menyebabkan menurunnya permintaan tenaga kerja pada perusahaan. Semakin tinggi angka inflasi maka semakin menurun pertumbuhan ekonomi negara, angka penurunan pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkatkan jumlah pengangguran (Amalin & Panorama, 2021). Untuk itu, pengangguran juga menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihindari. Indonesia sebagai negara dengan tingkat kependudukan terbesar no 4 di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 276 juta jiwa, dengan jumlah penduduk yang banyak ini Indonesia perlu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi. Data pengangguran di Indonesia per Februari 2022 mencapai 8.4 juta jiwa dengan persentase 5.83% dari total keseluruhan angkatan kerja di Indonesia yang berjumlah 144.04 juta jiwa (BPS, 2022). Dari data ini dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran negara Indonesia masih tergolong sangat tinggi. Pengangguran menjadi permasalahan yang harus ditanggapi dan diatasi oleh pemerintah sebagai penanggungjawab negara. Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi angka pengangguran yang tinggi.

Pada penelitian ini kami memilih salah satu provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Banten untuk menganalisis data inflasi serta tingkat pengangguran provinsi tersebut dari tahun 2011-2021.

Bulan	Inflasi Tahun ke Tahun Menurut Bulan di Provinsi Banten										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Januari	1.37	2.85	3.55	3.47	2.77	5.57	8.48	10.96	4.47	3.41	6.41
Februari	1.38	3.03	3.3	3.23	3.29	5.97	7.01	10.72	5.52	3.15	6.07
Maret	1.39	2.99	2.97	3.55	3.45	5.7	7.46	9.61	6.82	3.81	5.76
April	1.31	2.99	3.14	3.80	4.18	4.28	8.02	9.85	6.47	4.05	5.63
Mei	1.49	2.66	3.54	3.35	4.42	3.84	8.66	9.68	6.00	4.28	5.55
Juni	1.15	2.50	3.72	3.00	4.6	3.78	8.91	8.52	6.99	4.5	4.73
Juli	1.24	2.01	3.53	3.47	4.22	3.38	8.94	5.51	10.84	4.4	4.35
Agustus	1.46	1.52	3.76	3.68	4.28	2.58	8.74	5.53	10.59	4.38	4.55
September	1.40	1.63	3.64	3.42	4.17	3.01	8.14	6.12	9.78	4.59	4.18
Oktober	1.38	1.57	3.77	3.44	4.07	3.14	6.97	6.72	9.58	4.38	3.73
November	1.43	1.43	3.73	3.49	3.89	3.33	5.86	7.8	9.93	4.41	3.68
Desember	1.91	1.45	3.3	3.42	3.98	2.94	4.29	10.2	9.65	4.37	3.45

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)										
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Provinsi Banten	8.98	10.64	8.11	8.47	9.28	8.92	9.55	9.07	9.90	10.13	13.06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten (BPS)

II. MASALAH

Inflasi dan pengangguran merupakan permasalahan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mendorong peningkatan angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi pada Provinsi Banten menjadi permasalahan yang harus diatasi. Berbagai penyebab atas terjadinya permasalahan ini harus

segera ditangani melalui penetapan kebijakan dari pemerintah setempat. Kebijakan-kebijakan pemerintah ditetapkan untuk mengatasi permasalahan atas inflasi serta tingginya tingkat pengangguran pada Provinsi Banten. Untuk itu dilakukanlah penelitian ini untuk mencari penyebab dari tingginya tingkat pengangguran pada Provinsi Banten dan kebijakan apa saja yang dapat diterapkan oleh pemerintah Provinsi Banten.

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik (angka) dari pada naratif (Avery, 2006).

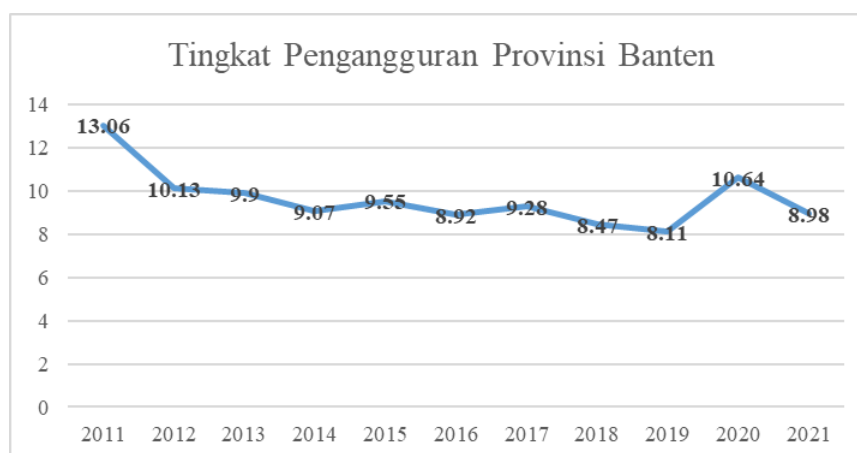
Metode pengambilan data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode Analisis Data Sekunder (ADS). Metode Analisis Data Sekunder (ADS) merupakan suatu metode menganalisis yang dilaksanakan pada data yang telah tersedia tanpa perlu melaksanakan kegiatan seperti wawancara, survei, pengamatan, serta teknik pengumpulan data tersendiri lainnya (Ilyas, 2021).

Dalam melaksanakan analisis data sekunder terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, dapat dimulai dengan merumuskan masalah lalu dilanjutkan dalam menggabungkan data sekunder yang berhubungan (terkait). Pendekatan yang kedua adalah dapat dimulai dalam menyatukan data sekunder terlebih dahulu, kemudian menelaahnya untuk mencermati perspektif (variabel) apa saja yang terdapat pada data tersebut. Selanjutnya pengumpulan data sekunder sebanyak serta menganalisis perspektif yang terdapat pada data tertentu.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Inflasi merupakan permasalahan yang sangat dihindari oleh suatu negara maupun provinsi didalamnya. Untuk itu pemerintah setempat sebagai penganggungjawab harus dapat memberlakukan kebijakan untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Inflasi yang terjadi di Provinsi Banten memiliki persentase 3.45% pada akhir tahun 2011. Pada akhir tahun 2012 persentase inflasi mencapai 4.37%. 9.65% merupakan persentase inflasi pada Provinsi Banten pada tahun 2013. Pada akhir tahun 2014 inflasi tertinggi terjadi mencapai 10.2% tertinggi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2015 inflasi mencapai 4.29%. Pada tahun 2016 persentase inflasi mencapai 2.94%. Tahun 2017 inflasi pada Provinsi Banten menyentuh 3.98%. Pada tahun 2018 inflasi mencapai 3.42%. Pada tahun 2019 inflasi Provinsi Banten 3.3%. Pada tahun 2020 inflasi mencapai 1.45% pada akhir tahun. Pada Desember 2021, inflasi pada provinsi ini mencapai 1.91% (BPS Banten, 2022b).

Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia. Banten merupakan kota industri, oleh karena itu banyak industri yang tutup atau bangkrut akibat terkena imbas Pandemi Covid-19. Selain itu, banyak pengusaha yang memindahkan lokasi pabriknya ke daerah lain. Berikut adalah data pengangguran terbuka Provinsi Banten pada tahun 2011-2021 dalam bentuk grafik:



Tingkat pengangguran yang tinggi akan menghambat upaya pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan juga pertumbuhan ekonomi negara. Banten merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pengangguran terbanyak di Indonesia. Setiap tahunnya angka pengangguran di Provinsi Banten menempati posisi teratas dengan jumlah persentase pengangguran diatas rata-rata nasional 4,99%. Pada tahun 2020, ledakan pengangguran terjadi pada bulan Februari dengan jumlah persentase pengangguran terbuka sebesar 8,01% sehingga menempati posisi pertama di Indonesia dengan jumlah pengangguran terbanyak (BPS Banten, 2020). Pada tahun 2021, persentase tingkat pengangguran di Provinsi Banten menyentuh angka 8.98% (BPS Banten, 2021). Pada tahun 2022 Tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan pada bulan Agustus dengan persentase pengangguran terbuka sebesar 8,09% (BPS Banten, 2022c). Masih berada diatas rata-rata angka pengangguran nasional membuat Provinsi Banten tetap menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia. Tingkat pengangguran yang tinggi juga disinyalir terjadi karena adanya beberapa faktor, yakni:

1. Pengaruh jumlah penduduk di Provinsi Banten

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun juga merupakan salah satu penyebab meningkatnya jumlah pengangguran pada provinsi tersebut. Ketidakseimbangan jumlah penduduk yang berada dalam usia kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia merupakan hal yang harus dihindari agar tingkat pengangguran tidak terlampaui tinggi. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Provinsi Banten adalah 11.904.562 jiwa, sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Provinsi Banten adalah 12.061.475 jiwa, pada tahun 2022 mencapai 12.251.985 jiwa (BPS Banten, 2022a). Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan peningkatan setiap tahunnya mengikuti kenaikan pengangguran terbuka yang juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

2. Adanya praktik pencaloan kerja yang menetapkan harga tinggi untuk dapat diterima suatu perusahaan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten ialah adanya praktik pencaloan kerja yang menetapkan harga tinggi untuk dapat diterima bekerja pada suatu pabrik atau perusahaan (BPK Banten, 2018). Hal ini menyebabkan sejumlah penduduk yang hidup di sekitar pabrik memilih untuk menganggur karena tidak mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh calo. Salah satu contoh tarif yang ditetapkan oleh oknum pencaloan kerja ialah pada pabrik yang berada di kabin Kabupaten Serang dengan tarif mencapai Rp4.000.000,00, warga yang tak mampu membayar tarif pencaloan ini mendorong pengangguran di Provinsi Banten meningkat (BPK Banten, 2018).

3. Para lulusan SMA/K yang tidak melanjutkan pendidikan sulit mendapatkan penawaran kerja.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa selain praktik pencaloan tenaga kerja banyak pelajar lulusan SMA/K yang baru lulus tidak dapat terserap oleh sektor industri yang ada (BPK Banten, 2018). Para pemilik industri enggan untuk menerima seluruh para lulusan SMA/K karena kapasitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pengangguran yang ada. Bursa yang bekerja sama dengan Provinsi Banten hanya Alfamart dan Indomaret yang juga belum bisa menutupi atau menyeimbangkan keseluruhan masyarakat yang sedang menganggur atau membutuhkan lapangan pekerjaan (BPK Banten, 2018).

4. Banyak perusahaan yang memilih untuk tidak membangun perusahaan di Provinsi Banten karena memiliki UMP yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMP di Provinsi Jawa Tengah.

UMP Banten yang terus mengingkat setiap tahunnya dan tergolong jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya dipulau jawa membuat para investor enggan untuk membangun perusahaan baru disana. Para investor lebih memilih untuk berinvestasi pada provinsi yang memiliki UMP lebih rendah, hal ini akan mengecilkan biaya pengeluaran operasional perusahaan. Untuk itu, UMP Banten yang tinggi juga menjadi salah satu faktor tingginya angka pengangguran di Provinsi ini. UMP Provinsi Banten pada tahun 2022 berkisar di angka Rp2.501.203,11 (Disnakertrans, 2022), sedangkan UMP Provinsi Jawa Tengah berkisar Rp1.813.011 (Disnaker, 2021). Dengan perbandingan yang sangat jauh membuat para investor enggan membangun perusahaan pada Provinsi Banten.

Berbagai kebijakan ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan angka inflasi sekaligus menekan tingkat pengangguran seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal merupakan sebuah

kebijakan ekonomi dalam mengarahkan keadaan perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan serta pengeluaran pemerintah (Isnaini, 2017). Kebijakan fiskal ialah kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah dalam menyelaraskan anggaran pendapatan dengan pengeluaran negara dari APBN yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan transformasi pada skema pajak yang berlaku. Oleh sebab itu, ketika kebijakan fiskal disetiap tahunnya selalu berbeda bisa dikatakan sangat wajar (Mirani et al., 2021).

Sebagai langkah menanggulangi dampak inflasi, pemerintah juga mendorong upaya pengendalian inflasi melalui kebijakan-kebijakan berikut (Moegiarso, 2022):

1. Pengurangan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah

Yaitu dengan mengarahkan dan menjaga keterjangkauan harga beli, dan kelancaran proses penyaluran. Contohnya dengan adanya subsidi, serta dengan memberikan bantuan sosial untuk masyarakat.

2. Dukungan pemerintah daerah sebesar 2% dari dana transfer umum (dana alokasi umum)

Dalam mengantisipasi dampak inflasi setelah melakukan penyesuaian, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebanyak 2% dari dana transfer umum. Dan dana alokasi itu akan digunakan sebagai pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum daerah, memberi bantuan sosial tergolong juga bagi ojek, nelayan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penyediaan lapangan kerja.

Sinergi penangan ini diwujudkan bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial pada pemerintahan daerah dan pusat. Diharapkan para masyarakat yang merasakan dampak inflasi dapat merasakan manfaat uang kas negara serta dapat terbantu pada pemenuhan kebutuhan di bidang energi. Untuk itu, kepala daerah yang diawasi pelaporannya oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah akan melakukan pemantauan dan pengelolaan pelaksanaan belanja wajib yang telah direncanakan. (Sambas, 2022).

3. Menaikkan Tarif Pajak

Cara mengatasi inflasi yaitu dengan menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak untuk perusahaan dan rumah tangga akan mengurangi tingkat konsumsi. Pengurangan tingkat konsumsi akan berpengaruh kepada harga suatu barang.

Salah satu tarif pajak yang dinaikkan ialah PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sebelumnya sebesar 10% kini dinaikkan menjadi 11% (Fitriya, 2022). Kenaikan pajak ini diterapkan pada tanggal 1 April 2022, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional melalui pajak. Tidak hanya itu, kenaikan tarif pajak ini juga ditujukan untuk menekan daya beli masyarakat yang akan menekan angka inflasi karna dinilai akan membuat para penjual/pedagang menurunkan margin harga jual barangnya (Anggela, 2022). Pemerintah juga merencanakan untuk menaikkan tarif pajak secara berkala, selanjutnya tarif pajak akan dinaikkan menjadi 12% dalam beberapa tahun kedepan. Hal ini tercantum pada Undang Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Fitriya, 2022).

4. Menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang

Jumlah inflasi yang terus meningkat harus mendapatkan penetapan harga maksimum bagi beberapa jenis barang. Penetapan harga yang dilakukan yaitu untuk menghindari terjadinya penjualan pada pasar gelap.

Kebijakan pemerintah dengan menetapkan harga maksimum untuk sejumlah barang juga dinilai dapat menekan angka inflasi. Istilah ini dikenal sebagai HET atau Harga Eceran Tertinggi. Hal ini dilakukan agar para pelaku produsen tidak menetapkan harga barang yang tinggi, hal ini juga akan menurunkan angka inflasi yang akan terjadi. Salah satu contoh HET yang telah ditetapkan ialah penetapan harga eceran tertinggi beras yang tertulis didalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017. Penetapan harga ini akan terus dievaluasi menyesuaikan dengan kondisi pasar serta nilai mata uang saat ini (Kemendag, 2017).

Kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai opsi utama karena kebijakan ini melakukan pemanfaatan pajak untuk memperluas lapangan kerja serta menekan angka pengangguran. Kebijakan yang dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan perekonomian. Apabila inflasi dapat teratasi maka angka pengangguran dapat

ditekankan untuk mengalami penurunan. Setelah melakukan analisis data Provinsi Banten terkait inflasi dan pengangguran, didapatkan hasil bahwa inflasi tidak terlalu mengganggu persentase pengangguran. Angka pengangguran yang tinggi disebabkan oleh faktor lain diluar inflasi yang telah disebutkan sebelumnya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi inflasi dalam upaya menekan tingkat pengangguran dengan kebijakan fiskal yaitu dengan memanfaatkan pajak dengan cara sebagai berikut:

1. Mengembangkan UMKM dan Mengoptimalkan Penurunan Tarif Pajaknya

UMKM memiliki pengaruh yang baik bagi perekonomian Indonesia karena UMKM merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia (Limanseto, 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai Rp 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi (BKPM, 2021).

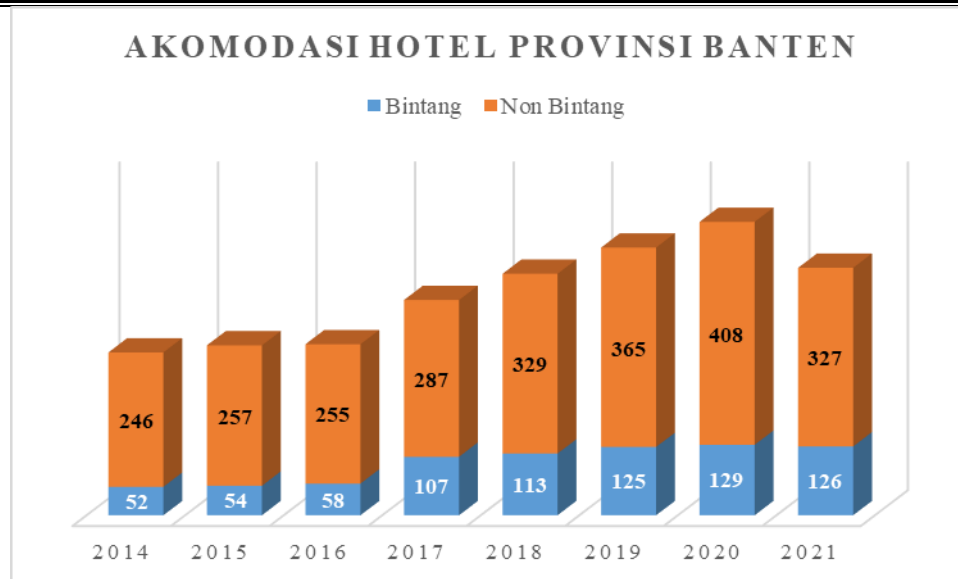
Menurunkan tarif pajak yang dikenakan pada UMKM merupakan salah satu faktor yang dapat membuat pertumbuhan UMKM menjadi lebih pesat. Dengan adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan pada UMKM, maka itu dapat membuka lapangan pekerjaan karena pertumbuhan UMKM yang lebih pesat yang dapat menurunkan tingkat pengangguran. Dalam hal ini, pemerintah telah sepakat dengan DPR dalam menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final yang dikenakan pada UMKM menjadi 0,5% per bulannya seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Nugroho, 2019). Dan diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan penurunan tarif pajak yang dikenakan pada UMKM ini dengan baik kedepannya.

2. Meningkatkan efektivitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ada

Dari perspektif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berperan dalam meningkatkan jumlah tenaga kerja. Terdapat 2.700 lowongan kerja untuk berbagai posisi di perusahaan milik negara yang pernah dilakukan oleh BUMN (Dewi, 2022). Saat ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat sebanyak 41 perusahaan per Maret 2022 dan dalam beberapa tahun terakhir terdapat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibubarkan seiring dengan upaya restrukturisasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan efisiensi dalam meningkatkan tenaga kerja (Karnadi, 2022). Dengan mengoptimalkan badan usaha milik negara, jumlah lapangan kerja akan bertambah, hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor usaha yang dibangun. Dengan ini, pengangguran di Provinsi Banten juga dapat menurun.

3. Memperluas Sektor Wisata dan Akomodasi Hotel

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa perjalanan wisata turun mendekati 100% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Lebih dari 2.000 hotel dan penginapan mengalami pemberhentian operasional. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan terhadap bahan baku (Kominfo, 2020). Oleh karena itulah sektor pariwisata yang seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan yang paling banyak untuk menciptakan dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Tempat wisata di Provinsi Banten saat ini berupa Pantai Anyer, Taman Nasional Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Gunung Krakatau, Kampung Baduy, dan masih banyak lagi. Ketersediaan akomodasi hotel seharusnya meningkat mengikuti perkembangan ketersediaan objek wisata di Provinsi Banten. Berikut adalah data akomodasi hotel pada Provinsi Banten dari tahun 2014-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Data diatas menunjukkan peningkatan ketersediaan akomodasi perhotelan untuk para wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan terjadi secara konsisten dari 2014 sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 penurunan jumlah akomodasi perhotelan mengalami sedikit penurunan pada hotel yang tidak berbintang sebanyak 81 hotel dan pada hotel berbintang sebanyak 3 hotel.

Menambah tempat wisata juga dapat menjadi peluang untuk memperluas lapangan kerja, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan sektor wisata serta akomodasi perhotelan. Selain meningkatkan pendapatan per kapita, langkah ini akan memperluas ketersediaan lapangan kerja yang akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Banten.

4. Mengoptimalkan Balai Pelatihan Kerja

Balai pelatihan kerja adalah sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau mendalami keahlian dibidang tertentu. Membuka pelatihan kerja memiliki banyak manfaat, contohnya dapat mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya, dapat menyesuaikan diri terhadap tuntutan bisnis saat pertama kali masuk kerja, dan masih banyak lagi. Kita dapat membuka pelatihan mengajarkan Microsoft office (word, excel, power point), karena ini adalah salah satu *skill* penting yang harus dimiliki seseorang sebelum bekerja. Dan aplikasi ini juga dapat membantu pekerjaan kita agar lebih cepat dan praktis. Balai pelatihan kerja sudah banyak di ciptakan namun belum dilakukan secara merata ke seluruh daerah. Diharapkan balai pelatihan kerja dapat dibangun hingga daerah yang terpencil. Balai pelatihan kerja dapat mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja dengan mengasah kemampuan yang telah dimiliki.

V. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah tingkat inflasi dalam suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dalam daerah itu. Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi tingkat pengangguran. Namun, tidak semua daerah mengalami keadaan yang sama, salah satunya Provinsi Banten. Provinsi ini memiliki tingkat inflasi yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor lain diluar dari persentase inflasi yang ada. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dinilai kurang efektif karena belum dapat mengurangi tingkat pengangguran pada Provinsi Banten. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan kebijakan yang paling efektif ialah dengan memanfaatkan kebijakan fiskal. Dengan pemanfaatan kebijakan fiskal yang memanfaatkan pajak, berbagai kebijakan dapat diciptakan dan dapat menekan angka pengangguran di Provinsi Banten.

Rekomendasi yang dapat diberikan setelah dilakukannya penelitian ini adalah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat meluncurkan berbagai kebijakan baru serta solusi untuk menurunkan angka pengangguran. Pemanfaatan pajak dapat dilakukan dengan menciptakan banyak lapangan kerja baru serta menurunkan pajak bagi pelaku UMKM, dan berbagai kebijakan lainnya yang memanfaatkan pajak untuk menekan angka pengangguran. Melalui kebijakan serta pemanfaatan pajak ini, seluruh masyarakat juga akan merasakan dampak yang baik. Karena dengan teratasinya pengangguran, maka pertumbuhan perekonomian negara juga dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalin, R. L., & Panorama, M. (2021). Dampak COVID-19 terhadap Tingkat Inflasi (Kelompok Pengeluaran Makanan, Minuman, Tembakau dan Kesehatan Periode 2010-2020). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 73–84. <http://ejurnal.uj.ac.id/index.php/jebi/article/view/1027/947>
- Anggela, N. L. (2022, March 23). Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Berdampak ke Inflasi, Ekonom Sarankan Langkah Ini. *Bisnis.Com*. <https://m.bisnis.com/amp/read/20220323/9/1514009/kenaikan-tarif-ppn-11-persen-berdampak-ke-inflasi-ekonom-sarankan-langkah-ini>
- Avery, R. K. (2006). Quantitative Methods in Broadcast History. In *Methods of Historical Analysis in Electronic Media* (pp. 167–183).
- BKPM. (2021). *Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia*. Kementerian Investasi/BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- BPK Banten. (2018). WH Ungkap Tiga Faktor Penyebab Tingginya Pengangguran di Provinsi Banten. In *Sub Bagian Hukum BPK RI Perwakilan Provinsi Banten*. <https://banten.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Catatan-Berita-WH-Ungkap-Tiga-Faktor-Penyebab-Tingginya-Pengangguran-di-Provinsi-Banten.pdf>
- BPS. (2022). *Februari 2022: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sebesar 5,83 Persen dan Rata-Rata Upah Buruh sebesar 2,89 juta rupiah per bulan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/05/09/1915/februari-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-83-persen.html>
- BPS Banten. (2020). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten Bulan Februari 2020 Sebesar 8,01 Persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/531/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--banten-bulan-februari-2020-sebesar-8-01-persen.html>
- BPS Banten. (2021). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,98 persen*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/633/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-8-98-persen.html>
- BPS Banten. (2022a). *Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/indicator/12/46/1/penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-banten.html>
- BPS Banten. (2022b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen), 2019-2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/indicator/6/157/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPS Banten. (2022c). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,09 persen Keadaan Ketenagakerjaan Banten Agustus 2022*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://banten.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/689/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-8-09-persen-keadaan-ketenagakerjaan-banten-agustus-2022.html>
- Dewi, R. K. (2022, April 14). Rekrutmen Bersama BUMN 2022, Ada 2.700 Lowongan Kerja, Ini Cara Daftarnya. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/13/060000165/rekrutmen-bersama-bumn-2022-ada-2700-lowongan-kerja-ini-cara-daftarnya?page=all>
- Disnaker. (2021). *Penetapan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2022*. Disnaker Semarang. https://disnaker.semarangkota.go.id/user/detail_berita/9

- Disnakertrans. (2022). *Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022*. Disnakertrans.
- Fitriya, F. (2022, August 15). Pengertian Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan PPN 11 Persen. *Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- Hartati, N. (2020). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2010 – 2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 92–119. <https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.86>
- Ilyas, F. (2021). Analisis Swot Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Terhadap Dampak Ekonomi Di Tengah Upaya Menekan Laju Pandemi Covid-19. *Jurnal Akrab Juara*, 6(3), 190–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i3.1559>
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 102–118. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aj.v3i1.1165>
- Karnadi, A. (2022, April 13). Banyak Dipangkas, Berapa BUMN yang Tersisa hingga Maret 2022? *DataIndonesia.Id*. <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/banyak-dipangkas-berapa-bumn-yang-tersisa-hingga-maret-2022>
- Kemendag. (2017). *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Nomor 57/M-Dag/PER/8/2017)*. Menteri Perdagangan Republik Indonesia. https://ews.kemendag.go.id/file/policy/Permendag_57_2017.pdf
- Kominfo. (2020). *Menko Luhut: Sektor Pariwisata Mulai Bergeliat*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28044/menko-luhut-sektor-pariwisata-mulai-bergeliat/0/berita>
- Limanseto, H. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>
- Mirani, K. P., Margareth, A. N., Cahyarani, N., & Maulana, A. (2021). The Government's Fiscal Policy Strategy to Improve The Economy of Indonesia in The Covid-19 Pandemic Period. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 193–204. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Moegiarso, S. (2022). *Upaya Pengendalian Inflasi, Melalui Sinergi Pusat - Daerah, Menjaga Produksi (Suplai) dan Menanggung Ongkos Transportasi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4587/upaya-pengendalian-inflasi-melalui-sinergi-pusat-daerah-menjaga-produksi-suplai-dan-menanggung-ongkos-transportasi>
- Ningsih, D., & Andiny, P. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- Nugroho, S. A. (2019). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. *Pajakku*. <https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6fd6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh-Final-untuk-UMKM>
- Sambas. (2022, September 8). Sinergi Penanganan Dampak Inflasi Melalui Belanja Wajib Perlindungan Sosial Sebesar 2% Dana Transfer Umum. *Antara Banten*. <https://banten.antaranews.com/berita/224581/sinergi-penanganan-dampak-inflasi-melalui-belanja-wajib-perlindungan-sosial-sebesar-2-dana-transfer-umum>